

## ABSTRAK

**Devi Mulyono:** Perubahan Kebijakan dalam Pelaksanaan bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO 08 2000 pada PT BPRS Al-Masoem Rancaekek Bandung

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Mukhwan Hariri, Riyadhho cipta dan Teti Kulsum tentang pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* dijelaskan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 karena menentukan nisbah bagi hasil di awal akad dengan metode analisis proyeksi. Sedangkan dalam perubahan kebijakannya di tahun 2007, tahapan penentuan nisbah bagi hasilnya memakai dua metode diantaranya analisis proyeksi bagi hasil dan analisis realisasi bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui perubahan kebijakan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek Bandung (2) untuk mengetahui tinjauan dari Fatwa DSN-MUI tentang penetapan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek Bandung.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan akad *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000. *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sudut pandang sifat penelitian hukum menggunakan metode deskriptif. Dari sudut penerapannya penelitian ini berfokuskan kepada masalah hukum yang diteliti, dimana dalam tujuan hukum sendiri terdapat penelitian hukum normatif dan hukum empiris, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini dan data sekunder diperoleh dari dua penunjang yang berkaitan dengan penelitian, buku, skripsi dan internet. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa (1) perubahan kebijakan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem pada tahun 2017 telah terjadi perkembangan yang sebelumnya penetapan perhitungan bagi hasil ditentukan di awal akad dengan jumlah nominal dan bersifat flat kemudian terjadi perubahan dengan menggunakan dua metode penghitungan, yaitu metode analisis proyeksi bagi hasil dan realisasi bagi hasil (2) berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.